

---

## Analisis Peran Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana di SD Gugus V Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone

Nana Karlina<sup>1</sup>, Muliadi<sup>2</sup>, Sudarto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Indonesia

---

### Abstrak

Kata kunci:  
Peran; Komite Sekolah;  
Sarana dan Prasarana

Masalah dalam penelitian ini adalah masih kurang optimalnya peran komite sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator di SD gugus V Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa komite sekolah telah melaksanakan perannya namun masih perlu dilakukan pengoptimalan seperti memberikan dorongan dan motivasi kepada orang tua siswa dan masyarakat agar memberi dukungan dalam membantu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Dengan optimalnya peran komite sekolah tersebut maka sangat membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.

### Abstract

Keywords:  
Role; School Committee;  
Facilities and  
Infrastructure

; The problem in this study is that the role of the school committee in managing school facilities and infrastructure is still not optimal. This research is a type of descriptive qualitative research that describes the role of the school committee as a giver of considerations, supporters, controllers and mediators in Elementary School cluster V, Sibulue District, Bone Regency. From the results of this study, it can be concluded that the school committee has carried out its role but still needs to be optimized, such as providing encouragement and motivation to parents and the community to provide support in helping to improve the quality of facilities and infrastructure. With the optimal role of the school committee, it is very helpful for schools to improve the quality of school facilities and infrastructure.

© Universitas Negeri Makassar 2021

---

Alamat Penulis<sup>1</sup>:  
E-mail: [nanakarlina024@gmail.com](mailto:nanakarlina024@gmail.com)

[p-ISSN](#)  
[e-ISSN](#)

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki dalam kehidupan setiap individu. Tujuan utama pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga pendidikan menjadi faktor utama dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Adanya pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia yang berkualitas, mandiri dan berguna bagi kemajuan bangsa dan negara. Pendidikan tidak hanya diperoleh di sekolah saja namun juga di luar sekolah, sehingga dikenal adanya pendidikan informal, nonformal dan formal.

Pendidikan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat dan orang tua. Peran masyarakat di dukung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 1 bahwa "Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan atau komite sekolah" Oleh karena itu, semua pihak sekolah harus menyadari adanya peran masyarakat yang terdiri dari orang tua siswa dan organisasi pendidikan. Peran serta masyarakat memiliki wadah di satuan pendidikan yang disebut dengan komite sekolah. Nasaruddin dan Muslimin (2018) manajemen berbasis sekolah masih kurang menunjukkan kerja sama yang baik karena masih rendahnya kemampuan akademik masyarakat berorganisasi (komite sekolah). Agar peran serta masyarakat dapat diberdayakan dan ditingkatkan, maka sekolah harus dapat membina kerja sama dengan orang tua dan masyarakat dengan membentuk komite sekolah.

Komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang membantu sekolah dalam meningkatkan pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam konsep komite sekolah, merupakan suatu inisiatif dalam rangka memajukan sekolah, agar tidak ada persepsi yang menyatakan bahwa komite sekolah sebagai wakil orang tua siswa dan masyarakat hanya memberikan peran berupa materi.

Terbentuknya komite lembaga pendidikan akan lebih mudah untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya. Komite akan membantu dalam memberikan solusi, penambahan dan pengembangan fasilitas yang dibutuhkan demi maju dan berkembangnya lembaga pendidikan tersebut.

Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Tidak hanya itu komite sekolah juga bertugas sebagai pendayagunaan kemampuan baik yang bersifat material keuangan maupun bersifat non material seperti berperan dalam memberikan pertimbangan, mendukung, mengontrol, dan mediator atau penyalur pemikiran di sekolah. Sedangkan menurut Putra (2014) bahwa dalam pengelolaan saran dan prasarana, komite sekolah harus berperan aktif yaitu mulai dari proses perencanaan, pengadaan, pengaturan, dan penghapusan sarana dan prasarana.

Unsur lain yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di sekolah yaitu adanya sarana dan prasarana sekolah. Sesuai dengan pendapat Siregar (2019) yang mengatakan bahwa

Guna memenuhi desain pembelajaran yang ideal di dalam sebuah sekolah, diperlukan sarana dan prasarana atau fasilitas belajar yang beragam seperti gedung atau ruang kelas, media atau alat bantu pembelajaran, perpustakaan, laboratorium, bahan praktek, dan tentunya sarana olahraga. (h.6)

Fasilitas belajar tersebut perlu dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Sesuai dengan pendapat Muliadi (2019) bahwa keberadaan sarana dan prasarana tidak kalah penting dalam aspek-aspek pengajaran. Dalam hal ini keberadaan sarana dan prasarana merupakan penunjang utama dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar mendapatkan hasil pengajaran yang diharapkan. Oleh karena itu, perlunya untuk menjaga dan memelihara sarana dan prasarana

dan tentunya hal ini melibatkan seluruh partisipasi dari warga sekolah yang ada. Setiap sekolah tentu memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang tingkat kelengkapannya berbeda. Kelengkapan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah tentu akan mempengaruhi kenyamanan anak dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh pada pencapaian tujuan umum dari sekolah tersebut. Semua pihak yang berada dalam organisasi di sekolah memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan kelangsungan pembelajaran sekolah, termasuk juga komite sekolah.

Peraturan dan penyelenggaraan komite sekolah telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 75 tahun 2016 yaitu, "Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan". Adapun menurut Mayarani dan Nurhikmahyanti (2014) bahwa komite sekolah pada dasarnya berada pada posisi antara orang tua siswa, siswa, guru, masyarakat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai lembaga sekolah. Komite sekolah merupakan perwakilan orang tua siswa yang dibentuk untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada sekolah dan memiliki kepedulian terhadap pendidikan.

Pengertian komite sekolah juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam pasal 56 ayat 3 yang berbunyi Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Demikian juga menurut Helmi (2018), komite sekolah adalah sebuah lembaga yang sifatnya mandiri atau independen. Sedangkan, mengenai kedudukan komite sekolah

berkedudukan disatuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang, tetapi masih berada dalam pada lokasi yang berdekatan, atau satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, baik karena pertimbangan lain. Jadi berdasarkan sifat dan kedudukan komite sekolah yaitu komite sekolah bersifat mandiri (independent), tidak mempunyai hierarki dengan sekolah manapun dengan lembaga pemerintah lainnya, sedangkan komite sekolah kedudukannya berada pada satuan pendidikan sekolah.

Kismanto (2016) mengatakan tujuan komite sekolah dibentuk untuk meningkatkan mutu pelayanan di sekolah. Peningkatan mutu tersebut didapatkan melalui kerjasama antara sekolah, komite sekolah dan masyarakat dengan menciptakan kondisi kerja yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Komite sekolah didirikan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat. Hal ini untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melalui kerja sama antara komite sekolah dengan pihak sekolah, komite dan masyarakat dengan kerja menciptakan suasana yang transparan, akuntabel, dan demokratis.

Peran komite sekolah yang diutarakan diatas sama yang diungkapkan Hasbullah (2010) yaitu

1. Sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan
2. Sebagai pendukung baik secara finansial, pemikiran, maupun tenaga kerja dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan
3. Sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan
4. Sebagai mediator antara pemerintah dan dengan masyarakat di satuan pendidikan

Agar masyarakat dapat ikut serta dalam membantu sekolah, maka dibentuk komite sekolah. Komite sekolah untuk mencapai tujuannya harus menjalankan fungsinya

dengan baik. Menurut Rofiq (2012) komite sekolah berfungsi sebagai berikut: Pertama, memberi pertimbangan, masukan, dan rekomendasi dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, tentang kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja di Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, hal-hal yang terkait dengan pendidikan, mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kedua, mendukung baik yang berbentuk finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Ketiga, mengontrol secara transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan. Keempat, penghubung antar sekolah dengan masyarakat disatuan pendidikan.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian dari setiap pengelola pendidikan. Hal ini dikarenakan pemenuhan sarana dan prasarana yang baik akan membantu menunjang penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan efisien.

Sedangkan menurut Indrawan (2015) manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen sarana dan prasarana. Komponen tersebut yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Sarana dan prasarana perlu dilakukan pendayagunaan dan pengelolaan untuk kepentingan pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Pengelolaan ini bertujuan agar pemanfaatan sarana dan prasarana di sekolah dapat berjalan dengan baik. Menurut Daryanto dan Farid (2013) pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan sangat penting dilakukan karena dengan keberadaannya dapat mendukung terhadap berhasilnya proses belajar mengajar di sekolah. Sedangkan menurut Mulyono (2010) bahwa:

Manajemen sarana pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pengadaan barang, pembagian dan penggunaan barang (inventasi), perbaikan barang, dan tukar tambah maupun penghapusan barang (Indrawan, 2015, h. 19)

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu semua fasilitas yang menunjang jalannya pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan diharapkan mampu menciptakan sekolah yang rapi, bersih, dan indah supaya menciptakan kondisi yang menyenangkan baik guru siswa yang ada di sekolah.

Manajemen sarana dan prasarana menurut Prihati (2017) diartikan sebagai kegiatan menata, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan dan perabot sekolah secara tepat guna dan tidak tepat guna. Sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah. Lahan adalah letak lokasi tanah atau suatu lahan yang telah dipilih secara seksama untuk dibangun diatasnya gedung. Bangunan berarti semua bangunan atau ruangan yang sengaja didirikan di atas lahan tersebut dan digunakan untuk kepentingan pendidikan serta menunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Sedangkan perabot dan perlengkapan berarti benda dan alat yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang digunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan atau dengan kata lain perlengkapan yang digunakan untuk terselenggaranya pendidikan. Agar semua fasilitas dapat memberikan kontribusi dengan baik dalam proses pendidikan maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Pengelolaan yang dimaksud menurut Abbas (2012) yaitu,

perencanaan, inventarisasi, pemeliharaan, penggunaan, dan penghapusan.

#### 1. Perencanaan

Dari perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang memiliki arti rancangan atau kerangka dari suatu yang akan dilakukan pada masa depan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki peran untuk mengatur dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan.

Proses manajemen sarana dan prasarana diawali dengan perencanaan. Guna dilakukan perencanaan sarana dan prasarana untuk mengetahui sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan. Proses perencanaan sebaiknya melibatkan unsur-unsur penting di sekolah seperti kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dewan guru, kepala tata usaha, bendahara, dan komite sekolah.

#### 2. Pengaturan

Setelah proses pengadaan dilakukan, proses manajemen sarana dan prasarana selanjutnya ialah proses pengaturan sarana dan prasarana. Ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam proses pengaturan ini, yaitu inventarisasi, penyimpanan, dan pemeliharaan.

##### a) Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan mencatat dan menyusun sarana dan prasarana yang ada secara teratur, tertib, dan lengkap berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sarana dan prasarana yang berasal dari pemerintah (milik Negara) wajib diadakan inventarisasi. Melalui inventarisasi akan dapat diketahui dengan mudah jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, merek/ ukuran, dan harga barang-barang yang ada di sekolah.

##### b) Penyimpanan

Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan sarana dan prasarana pendidikan di suatu tempat agar kualitas dan kuantitasnya terjamin. Kegiatan penyimpanan meliputi, menerima barang, menyimpan barang, dan mengeluarkan atau mendistribusikan barang. Dalam kegiatan ini diperlukan gudang sebagai tempat untuk menyimpan

barang-barang yang perlu disimpan dalam suatu tempat.

##### c) Pemeliharaan

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan.

#### 4. Penggunaan

Penggunaan dapat dikatakan sebagai kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan. Proses penggunaan, yaitu pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pendidikan

Menurut Daryanto dan Farid (2013) bahwa dalam penggunaan perlengkapan pendidikan ada dua prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip efektivitas merupakan semua penggunaan perlengkapan pendidikan di sekolah harus ditunjukkan semata-mata dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan prinsip efisiensi merupakan semua penggunaan perlengkapan pendidikan di sekolah digunakan secara hemat dan hati-hati.

#### 5. Penghapusan

Menurut Barnawi & M. Arifin (2012) penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventarisasi karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi lagi sebagaimana yang mestinya terutama sebagai fungsinya dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Mayarani dan Nurhikmahyanti (2014). Penghapusan tersebut berarti pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan dapat dipertanggungjawabkan. Penghapusan sebagai salah satu fungsi

manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah perlu mempertimbangkan alasan-alasan tertentu berdasarkan aturan yang berlaku.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen pendidikan yang harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Menurut peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 ayat 8 yang berbunyi:

“Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi”.

Adapun menurut Indrawan (2015) sarana dan prasarana sekolah dapat dikelompokkan menjadi sarana dan prasarana SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA. Kelengkapan sarana dan prasarana SD/MI yang sekurang-kurangnya terdiri dari ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang beribadah, ruang sirkulasi, tempat bermain atau berolahraga, gudang, jambang, ruang UKS. Sarana merupakan semua prangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung menunjang pendidikan seperti, gedung, ruang kelas, meja kursi, serta media pembelajaran. Sedangkan prasarana merupakan semua perlengkapan dasar yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan seperti, halaman, kebun, taman sekolah dan jalan menuju sekolah. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan cara seperti perencanaan, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan.

Setelah melakukan pra penelitian dilakukan observasi pada tanggal 25 Januari 2021 di SD gugus V Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, ditemukan fakta melalui pengamatan bahwa di SD gugus V Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone memiliki sarana dan prasarana antara lain: 1) sarana berupa

perabotan seperti meja, kursi, rak buku di ruang perpustakaan, ranjang dan kasur di ruang UKS, dan komputer di ruang administrasi, sedangkan sarana yang berupa peralatan dan media pembelajaran seperti globe, peta, tata surya, materi pembelajaran dalam bentuk cetak dan digital, buku pelajaran, dan buku penunjang, selain itu juga terdapat alat olahraga seperti bola voli, net, bola kasti, dan takraw. 2) Prasarana berupa ruang kelas, lapangan untuk berolahraga, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, kantin, WC, dan tempat beribadah.

Selain itu, juga didapatkan informasi dari beberapa guru di SD Gugus V Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone yang mengatakan bahwa sarana dan prasarana masih ada yang layak digunakan dan ada juga yang membutuhkan perawatan karena sarana dan prasarana tersebut jarang terpakai, hal ini disebabkan adanya wabah COVID 19 sehingga pembelajaran tidak memungkinkan dilakukan secara tatap muka. Sarana dan prasarana di SD gugus V Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone juga perlu ada perawatan seperti buku-buku yang ada di perpustakaan, peralatan olahraga dan media pembelajaran, namun demikian, diperlukan biaya untuk melakukan pengembangan ke depan yang lebih baik. Adanya masalah tersebut sangat dibutuhkan perhatian warga sekolah terutama komite sekolah. Salah satu fungsi komite sekolah yaitu membantu sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana termasuk pengadaan dana seperti melakukan penggalangan dana.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukinawan (2014) yang berjudul Peran Komite Sekolah dalam Proses Manajemen Sekolah di SD Negeri Serayu Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut adalah komite sekolah berperan dalam pembangunan fasilitas sekolah dengan cara melakukan penggalangan dari orang tua siswa, alumni, dan *sponsorship*. Peran komite sekolah dapat juga dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Basith (2020) yang berjudul Kontribusi Kinerja Komite Sekolah Terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Pelaksanaan kegiatan komite sekolah sangat berpengaruh

terhadap pelaksanaan peningkatan mutu sarana dan prasarana di SMKN 1 Karangan.

Berdasarkan kenyataan tersebut dapat diketahui bahwa komite sekolah sangat berperan dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana peran komite sekolah dalam usaha pengelolaan sarana dan prasarana di SD gugus V kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Penelitian ini diberi judul Analisis Peran Komite Sekolah dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana di SD Gugus V Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone.

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator dalam mengelola sarana dan prasarana di SD gugus V Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator dalam pengelolaan sarana dan prasarana di SD gugus V Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Manfaat Teoretis yaitu, menambah ilmu dan wawasan bagi komite sekolah terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi tentang peran komite sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Manfaat Praktis yaitu, sebagai masukan bagi sekolah dalam menjalin hubungan dan kerjasama dan memaksimalkan peran komite sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi komite sekolah untuk kinerja dalam lingkungan sekolah khususnya dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Peneliti dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

## **METODE PENELITIAN**

Pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Yusuf (2017) mengatakan penelitian kualitatif adalah mencari makna,

pemahaman, pengertian, *versthen* tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti. Penelitian ini, penulis dalam mengumpulkan data dan atau informasi dilakukan secara tahap demi tahap dan penulis berusaha memahami suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi.

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 19 Mei 2021 dan berakhir pada tanggal 23 Juni 2021. Penelitian ini dilaksanakan di gugus V di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone yang terdiri dari 4 sekolah yaitu UPT SDN 228 Tunreng Tellue yang beralamat di desa Tunreng Tellue dusun Kaju, UPT SD Inpres 3/77 Massenrengpulu yang beralamat di desa Massenrengpulu dusun Tappere yang terletak samping kantor desa Massenrengpulu, UPT SDN 230 Massenrengpulu yang beralamat desa Massenrengpulu dusun Batue yang terletak  $\pm$  20 meter dari masjid Baitul Rahman, dan UPT SD Inpres 5/81 Balieng Toa yang beralamat di desa Balieng Toa.

Subjek penelitian ini ada 12 orang yang terdiri dari 4 komite sekolah, 4 kepala sekolah dan 4 guru di SD gugus V Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Sekolah yang termasuk dalam penelitian ini yaitu SD Inpres 3/77 Massenrengpulu, SDN 230 Massenrengpulu, SDN 228 Tunreng Tellue, dan SD Inpres 5/81 Balieng Toa.

Langkah-langkah dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Moloeng (2014) tahap penelitian ini terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. (Sidiq & Choiri, 2019)

Tahap pra-lapangan dilakukan sebelum penulis mengumpulkan data. Tahap pra-lapangan dilakukang dengan langkah berikut, penyusunan rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan penelitian, menjajaki dan menilai lokasi penelitian, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan dilakukan juga tahap pertimbangan yaitu persoalan etika penelitian.

Tahap pengerjaan lapangan, penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan

dalam penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Tahap ini penulis mulai menentukan partisipan yang akan dijadikan sebagai sumber informasi yang mendukung dalam penelitian.

Tahap analisis data merupakan tahap di mana penulis melakukan analisis data apa yang telah diperoleh, baik dari informan maupun dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara. Teknik ini digunakan oleh penulis untuk menggali informasi terkait peran yang diberikan komite sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Penulis melakukan wawancara mendalam kepada ketua komite sekolah di SD gugus V Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Penulis juga melakukan wawancara mendalam kepada beberapa pihak yang dapat memberikan data yang akurat yaitu kepala sekolah, ketua komite sekolah dan guru.

Pemeriksaan keabsahan data yang dapat dilakukan sesuai dengan pendapat Yusuf (2014) bahwa data yang dikumpulkan selalu dilakukan keabsahan data agar tidak terjadi informasi yang salah atau tidak sesuai dengan konteksnya, sehingga penulis perlu melakukan pemeriksaan keabsahan data yang meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *comformity*.

Menurut Yusuf (2017) analisis data diawali dengan menelusuri dan mencari catatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengorganisasian dan menata tersebut ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, penyusunan pola, dan memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhir membuat kesimpulan dan laporan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huber (Sidiq & Choiri, 2019) yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (pengambilan keputusan).

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan jawaban wawancara diperoleh hasil dalam peran komite sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah dasar sebagai berikut:

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah. Sebelum menyusun program kerja komite sekolah, terlebih dahulu komite sekolah melakukan rapat bersama dengan pihak sekolah untuk merancang perencanaan program kerja kedepannya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu M, selaku kepala sekolah UPT SD Inpres 3/77 Massenrengpulu dari hasil wawancara diperoleh keterangan,

*Iya, tergantung dari kepala sekolah. Begini sebelum diadakan rapat kita undang dulu masyarakat. Misalnya kita mau menentukan program kerja kita panggil komite artinya kita bersama-sama dulu berenbut bersama pihak sekolah untuk merumuskan bagaimana program sekolah kedepannya.*

Setelah melakukan perencanaan yang telah dirumuskan dalam program kerja komite sekolah yang termasuk juga perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah selanjutnya tahap untuk mengadakan sarana dan prasarana, dalam hal ini komite sekolah ikut dalam rapat ketika akan diadakan sarana dan prasarana sekolah seperti pengadaan kursi atau lemari, komite juga turut memberikan masukan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Ibu HB, selaku kepala sekolah UPT SDN 228 Tunreng Tellue

*Iya, cerita-ceritami apa yang kurang seperti kekurangan lemari. Untuk penyusunan rencana dilakukan diawal 1 tahun biasanya sekali setahun. Mengingat semua apa yang menjadi kekurangan di kelas kemudian berkumpul untuk mendiskusikan bersama dengan komite.*

Dalam kegiatan pengaturan sarana dan prasarana seperti inventarisasi, pemeliharaan, dan penyimpanan komite sekolah tidak terlalu memberikan peran besar. Untuk kegiatan pengaturan sarana dan prasarana, wewenang sepenuhnya diberikan kepada pihak sekolah

selaku pengelola sarana dan prasarana di sekolah. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengaturan sarana dan prasarana berasal dari pihak sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Bapak A, selaku ketua komite sekolah UPT SD Inpres 5/81 Balieng Toa diperoleh keterangan,

*Tidak, Sekolahlah yang melakukan itu dek, namun terkadang untuk pemeliharannya kadang komite ikut bantu bantu misalnya perbaikan bangku-bangku dan bantu bantu mengecat*

Sama halnya yang diungkapkan oleh bapak N, selaku ketua komite UPT SDN 230 Massenrengpulu bahwa:

*Tidak, untuk pengaturan diserahkan kepada pihak sekolah (N)*

Selain itu penggunaan sarana dan prasarana juga diserahkan kepada pihak sekolah karena pihak sekolah lebih mengetahui fungsi dan penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak F, selaku ketua komite UPT SD Inpres 3/77 Massenrengpulu

*Tidak, Untuk pengawasan dilakukan pihak sekolah karena mereka lebih mengetahui menggunakan sarana dan prasana dengan baik.*

Sedangkan peran komite sekolah dalam penghapusan sarana dan prasarana sekolah, awalnya meminta pertimbangan kepada pihak sekolah apakah sudah layak dilakukan penghapusan atau belum terutama untuk prasarana, namun untuk sarana seperti bahan pembelajaran tidak dilibatkan komite sekolah seperti yang diungkapkan oleh Bapak A, selaku ketua komite sekolah UPT SD Inpres 5/81 Balieng Toa yang diperoleh hasil wawancara berikut

*Iya, kita rapat dulu jika itu penghapusan prasarana tapi kalau untuk bahan pembelajaran iya tidak dek.*

Peran komite sekolah sebagai pemberi pendukung (*supporting agency*) pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah, dalam proses pengadaan sarana dan prasarana sekolah,

sebelumnya harus dilakukan perencanaan yang matang. Pembentukan panitia dalam pembangunan sarana dan prasarana juga dilakukan penyusunan anggaran, pembagian kerja anggota dan pembelian barang. Pembentukan panitia dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu HR, selaku kepala sekolah UPT SDN 230 Massenrengpulu yaitu:

*iya, jika memang pengadaan sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan komite maka kami libatkan komite sekolah. Biasanya komite sekolah ikut mengawasi*

Selain menjadi kepanitiaan, peran komite sebagai pemberi pendukung dalam pengadaan sarana dan prasarana menjadi salah satu unsur penting yaitu adanya sumbangan dari para orang tua. Peran komite sekolah sangat penting dalam penggalangan dana yang berasal dari orang tua siswa untuk pembangunan dan pembuatan fasilitas sarana dan prasarana di sekolah. Namun untuk pengadaan sarana dan prasarana masih sebagian besar menggunakan Bantuan Operasional Sekolah. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu AF, salah satu guru UPT SDN 230 Massenrengpulu diperoleh keterangan berikut

*Tidak, dari dana BOS dan sumbangan orang tua.*

Pengadaan sarana dan prasarana juga terkadang mendapatkan bantuan dari alumni dan juga dari pemerintah setempat berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu K salah satu guru UPT SDN 228 Tunreng Tellue

*Ya, Dari pemerintah setempat, alumni, dulu ini waktu pembangunan mushollah pemerintah setempat yang juga ikut memberikan dana.*

Dalam pengaturan sarana dan prasarana komite sekolah tidak berperan aktif, namun demikian tetap memperhatikan kondisi sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa komite sekolah dalam pengaturan sarana dan prasarana seperti inventarisasi, pemeliharaan dan penyimpanan tidak berperan aktif serta pengaturan sarana dan

prasarana diserahkan sepenuhnya pada pihak sekolah.

Penghapusan sarana dan prasarana yang sering dilakukan oleh sekolah biasanya melakukan perbaikan atau menganggarkan kembali untuk pengadaan sarana dan prasarana tergantung dari kondisinya. Dalam penghapusan sarana dan prasarana melibatkan komite sekolah namun hanya penghapusan prasarana saja untuk sarana tidak melibatkan komite.

Peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah, dalam proses perencanaan pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan menghadirkan komite sekolah sebagai wakil dari orang tua wali murid dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Ibu HB, selaku kepala sekolah UPT SDN 228 Tunreng Tellue bahwa

*Terlibat, Komite sekolah di panggil dalam penyusunan RKAS. Dia ketua komite yang ma tanda tangan dan diketahui oleh kepala sekolah dan bendahara*

Selain melakukan pengawasan dalam proses perencanaan sarana dan prasarana, komite juga melakukan pengawasan pada proses pengadaan sarana dan prasarana juga. Salah satu bentuk pengawasan yang diberikan oleh pihak komite sekolah dalam proses pengadaan sarana dan prasarana sekolah yaitu mengontrol apa yang telah di kerjakan.

Untuk pengaturan dan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, meskipun peran yang diberikan komite sekolah tidak terlalu besar, komite sekolah juga melakukan pengawasan. Hal ini dilakukan agar komite sekolah dapat memantau secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang sedang digunakan.

Pada proses pengadaan sarana dan prasarana, sebagai mediator dari orang tua siswa dan masyarakat, komite sekolah berperan dalam menjembatani sumbangan dana dari orang tua siswa dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana. Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa sebagian besar dalam

pengadaan sarana dan prasarana komite bekerja sama dengan pihak sekolah yaitu mendapat dukungan dari orang tua siswa dan masyarakat baik bantuan berupa materil maupun berupa tenaga dan hasil pengajuan proposal sedangkan sebagian yang lainnya menggunakan dana BOS.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai peran komite sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana di SD gugus V Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, komite sekolah telah melakukan perannya sebagai badan pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan mediator masyarakat dalam pengadaan sarana dan prasarana. Meskipun dalam pelaksanaan perannya masih ada yang belum maksimal namun secara umum sudah baik.

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana sudah terlibat dalam penyusunan program kerja komite sekolah yang mencakup cara perencanaan sarana dan prasarana sekolah yang disusun bersama oleh komite sekolah, kepala sekolah dan guru. Selain itu, juga memberikan usul dan masukan terkait pengadaan sarana dan prasarana sampai pada proses penghapusan sarana dan prasarana. Berdasarkan hal tersebut kita dapat mengetahui peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan sesuai dengan pendapat Ulfaturrahmi, Ramdani, & Witono, (2020) peran komite tidak terlepas dari keterlibatan komite sekolah dalam memberikan masukan dan kontribusi mulai dari penyusunan RAB dan pengadaan dana sehingga dana sekolah lebih transparan.

Peran komite sekolah sebagai pendukung, komite sekolah melaksanakan perannya dengan ikut menjadi panitia dalam proses pengadaan sarana dan prasarana, melakukan penggalangan dana dari orang tua siswa ataupun kepada masyarakat, memberikan dukungan berupa tenaga dan pikiran, serta memberikan masukan untuk kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di

sekolah. Selain itu komite sekolah ikut membantu dalam memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak. Peran komite sekolah sebagai pendukung didukung oleh pendapat Febriana, (2019) komite sekolah sangat membantu sekolah dalam hal anggaran dengan mengajukan bantuan tanpa memberatkan orang tua siswa serta membantu fasilitas yang kurang.

Peran komite sekolah sebagai pengontrol yaitu komite sekolah telah melakukan pengawasan atas dana yang telah dialokasikan untuk perbaikan fasilitas sekolah dengan ikut terlibat dalam penyusunan RKAS bersama kepala sekolah dan guru. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah yaitu melakukan pengecekan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Selain itu dalam komite sekolah pengontrol pengadaan sarana dan prasarana dengan ikut serta dalam kepanitiaan, Dalam penghapusan sarana dan prasarana komite sekolah ikut terlibat dalam penghapusan baik hadir langsung maupun mendapatkan informasi dari pihak sekolah. Peran komite sekolah sebagai pengontrol sesuai dengan hasil penelitian Nurlita & Bachtiar, (2020) bahwa dalam aspek transparansi komite sekolah melakukan pengontrolan pada setiap kegiatan sekolah diantaranya mengontrol pelaksanaan program kegiatan sekolah penyusunan RPS, penyusunan RAPBS serta aspirasi masyarakat.

Peran komite sekolah sebagai mediator yaitu menyampaikan pendapat masyarakat kepada pihak sekolah. Pengadaan sarana dan prasarana, komite sekolah menjembatani dana dari orang tua siswa atau masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana. Dalam hal ini meskipun hanya sebagian kecil sekolah mendapat dukungan dana dari orang tua dan yang menjadi pendukung besar dalam pengadaan sarana dan prasarana di sekolah adalah dana Bantuan Operasional Sekolah. Peran komite sekolah sebagai mediator didukung oleh pendapat Hayat, Samad, & Ratmawati, (2021) penyampaian aspirasi masyarakat, orang tugas siswa dan pemerintah disampaikan melalui komite.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan fokus penelitian, hasil analisis dan pembahasan maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yaitu komite sekolah berperan dalam memberikan usul dan masukan mulai dari penyusunan RKAS, cara pengadaan sarana dan prasarana sampai dengan penghapusan sarana dan prasarana. Peran komite sekolah sebagai pendukung (*supporting agency*) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yaitu ikut terlibat dalam kepanitiaan pengadaan sarana dan prasarana, melakukan penggalangan dana dari orang tua siswa, dan ikut memberi dukungan dalam pemilihan sarana dan prasarana yang perlu dilakukan perbaikan atau penggantian sarana dan prasarana. Peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam pengelolaan sarana dan prasarana bahwa komite sekolah ikut serta dalam penyusunan RKAS, melakukan pengawasan pengadaan sarana dan prasarana dengan ikut terlibat dalam kepanitiaan, selain itu melakukan pengecekan sarana dan prasarana serta ikut terlibat dalam penghapusan sarana dan prasarana baik hadir secara langsung diwakili oleh anggotanya. Peran komite sekolah sebagai mediator dalam pengelolaan sarana dan prasarana yaitu komite sekolah menjadi jembatan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak sekolah, sebagai penyalur dana dari orang tua meskipun hanya sebagian besar sekolah yang mendapatkan dukungan dana dari orang tua siswa.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan komite sekolah di SD gugus V Kecamatan Sibulue Kabupaten dalam pengelolaan sarana dan prasarana sudah baik.

Disarankan bagi sekolah, saran yang pertama sekolah diharapkan untuk terus meningkatkan kerja sama dengan komite sekolah seperti yang sudah dilakukan saat ini terutama dalam hal peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Kedua, untuk kamar

mandi sekolah hendaknya segera dilakukan perbaikan agar para siswa tidak perlu mengantri terlalu lama bila akan ke kamar mandi sehingga tidak mengganggu jalannya pembelajaran di sekolah. Bagi komite sekolah, keaktifan peran komite sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana hendaknya terus dipertahankan dan ditingkatkan. Bagi orang tua wali murid, hendaknya terus meningkatkan dalam memberikan dukungan kepada komite sekolah dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. Tidak harus berupa dana, dapat juga berupa ide atau gagasan yang inovatif.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, H. E. (2012). *Menuju Sekolah Mandiri*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ahmadi, R. (2014). *metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Barnawi & M. Arifin. (2012). *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Basith, A. dan I. R. (2020). kontribusi Kinerja Komite Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 14–25.
- Daryanto dan Farid, M. (2013). *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Yogyakarta: Gava Media.
- E. Mulyasa. (2018). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasbullah. (2010). *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali.
- Helmi, J. (2018). Implementasi Program Kerja Komite Sekolah. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 10(1), 18–33.
- Indrawan, I. (2015). *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Kismanto. (2016). Partisipasi Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (HPMBS) di SMKN 3 Yogyakarta. *Skripsi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah*
- Komite Sekolah dalam Pengadaan Saran dan Prasarana di SD Negeri Pucang IV Sidoarjo. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 4(4), 163–176.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Muliadi. (2019). Profil Sarana dan Prasarana Pengajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar Negeri Kec. Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. *Jikap PGSD: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(1). 35-39.
- Muslimin, Nasaruddin (2018). Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada SD Inpres Bira 1 Kota Makassar. *JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidika*, 2(2), 1-9.
- Mulyadi, M. (2018). Peran Komite dalam Pelayanan Peningkatan Mutu Pendidikan Di MAN 1 Pidie. *Skripsi*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.
- Prihati. (2017). Peran Komite Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Di MI Islamiyah Banyuwang. *Skripsi*.
- Putra M.D.P. (2014). Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana di SD Negeri Ctutunggal 6 Depok Sleman Yogyakarta. *Skripsi*.
- Rofiq, A. (2012). Peran dan Fungsi Komite Madrasah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapat Belanja Di MTsN Lumajang. *Tesis*.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Sidiq, U., & Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya.
- Siregar, D. U. (2019). Peran Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana di MTS Negeri 2 Medan. *Skripsi*.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukinawan, K. (2014). Peran Komite Sekolah

- dalam Proses Manajemen Sekolah di SD Negeri Serayu Yogyakarta. *Skripsi*.
- Tanjung, F. Z., Annisa, M., & Ridwan. (2016). Analisis sarana dan prasarana sekolah dasar berdasarkan tingkat akreditasi di kota tarakan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. 5(2), 134–146.
- Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- UU RI Nomor 20 Tahun 2003. *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.